

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Dalam upaya menyajikan suatu penulisan yang jelas dan terarah serta tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka perlu diberikan batasan maupun ketegasan terhadap setiap yang tercakup dalam penulisan skripsi ini dalam bentuk kerangka berpikir melalui teori-teori terkait dan konsep-konsep kunci dengan demikian diharapkan dapat terhindar dari kesalah pengertian. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu PDRB, Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Jumlah Penduduk.

1. Tingkat Kemiskinan

Dalam tingkat kemiskinan terdapat beberapa penjelasan mengenai definisi kemiskinan, dan faktor-faktor kemiskinan. Berikut penjelasannya:

a. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan yang menjadi suatu masalah di beberapa Negara berkembang merupakan gambaran dari kondisi seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan standar yang berlaku. Berbagai teori muncul untuk menegaskan penjelasan tentang kemiskinan

Pengertian kemiskinan menurut Kuncoro (2006), diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum. Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BAPPENAS, 2010) mendefinisikan kemiskinan

berdasarkan pendekatan keluarga, yaitu membagi kriteria keluarga dalam lima tahapan: keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), keluarga sejahtera II (KS-II), keluarga sejahtera III (KS-III) dan keluarga sejahtera III plus (KS-III plus). Keluarga Sejahtera I merupakan kelompok orang yang termasuk dalam klasifikasi mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*). Klasifikasi Keluarga Sejahtera II yaitu kemampuan kelompok orang dalam memenuhi kebutuhan psikologi (*psychological needs*) dan klasifikasi Keluarga Sejahtera III adalah kemampuan kelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pengembangan (*developmental needs*). Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu :

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup layak. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan rumah agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Seseorang termasuk dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk mendapatkan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini di maksudkan untuk

menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan rumah untuk menjamin kelangsungan hidup (Todaro, 2006).

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan Relatif merupakan kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan social, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya. Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan (Todaro, 2006).

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi variasi kemiskinan di negara berkembang adalah:

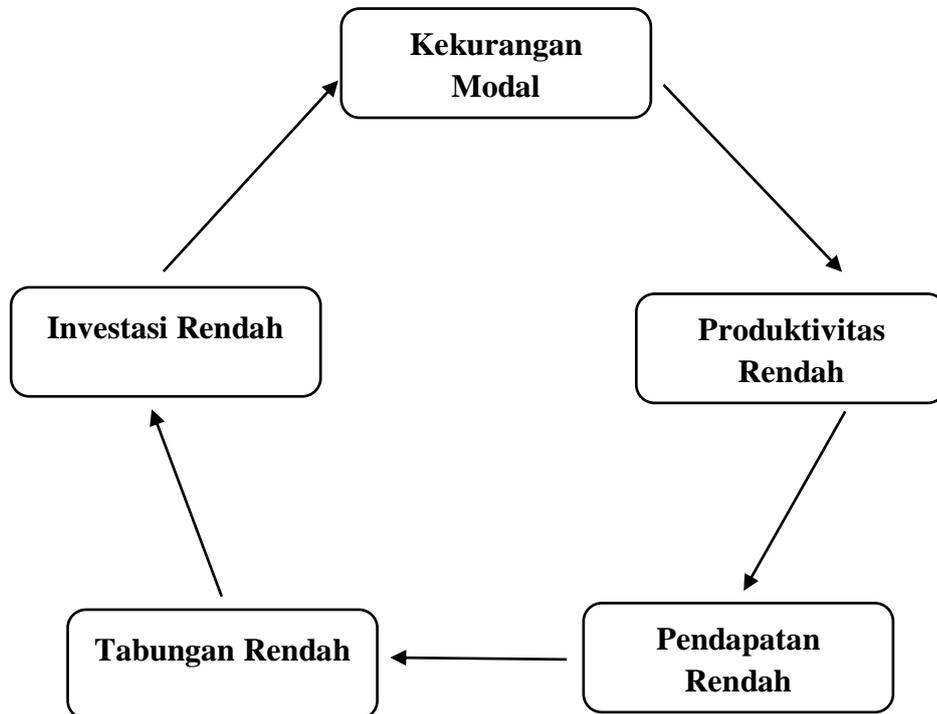
- 1) Perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan
- 2) Perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh Negara yang berlainan
- 3) Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya
- 4) Perbedaan peranan sector swasta dan Negara
- 5) Perbedaan struktur industri
- 6) Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik Negara lain

7) Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik, dan kelembagaan dalam negeri (Todaro, 1997).

Pola kemiskinan ada empat yaitu, pertama adalah *persistent proverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical proverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal proverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani pangan. Pola keempat adalah *accidental proverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (Djojohadikusumo, 1995).

Penyebab kemiskinan dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, secara mikro, kemiskinan karena ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya sehingga distribusi pendapatan timpang. Kedua, kemiskinan karena perbedaan akses modal. Ketiga, kemiskinan akibat perbedaan akses modal. Dari ketiga penyebab kemiskinan tersebut bias dijelaskan melalui teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of proverty*) (Kuncoro, 2006). Keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menjadi penyebab produktivitas rendah sehingga pendapatan yang diterima pada akhirnya juga rendah (Nurkse dalam Kuncoro, 2006). Pendapatan yang rendah akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, kemudian rendahnya investasi

tersebut akan menyebabkan keterbelakangan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1.



Sumber: Mudrajad Kuncoro, 2006.

Gambar 2. 1
Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse

Nurkse (1953) menjelaskan kemiskinan merupakan keterkaitan beberapa faktor yang akan berujung pada kemiskinan. Gambar diatas dapat menjelaskan pendapat Nurkse yang mengatakan bahwa “*a poor country is poor because it is poor*” (Negara miskin itu miskin karena dia memang miskin).

Penyebab kemiskinan dapat dibagi kedalam 4 Mazhab yang berbeda (Winarendra, 2014):

- 1) *Individual Explanation*, kemiskinan dalam terminology karakteristik orang miskin itu sendiri, yaitu hasil dari kemalasan,

kekurangan perorangan atau beberapa macam kekurangan atau kecacatan, seorang miskin karena membuat kesalahan pilihan, memiliki anak pada waktu yang tidak tepat, gagal untuk bekerja dan sebagainya.

- 2) *Familia Explanation*, kemiskinan yang dapat diakibatkan oleh faktor keturunan, dimana terdapat warisan pada generasi selanjutnya sehingga terjadi *ketidakberuntungan* yang berulang terus ke generasi selanjutnya, baik dalam warisan asuhan dan pendidikan.
- 3) *Subcultural Explanation*, kemiskinan karena pola perilaku, tapi lebih disebabkan oleh keadaan pada pilihan personal.
- 4) *Structural Explanation*, mengidentifikasi kemiskinan sebagai hasil dari masyarakat di tempat tersebut. Kemiskinan menciptakan suatu kesenjangan yang diinterpretasikan oleh adanya divisi social, kelas, status atau kekuatan.

2. Produk Domestik Regional Bruto

a. Definisi PDRB

Badan Pusat Statistik mendefinisikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Oleh

karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut (Permana, Anggit Yoga dan Arianti, 2012).

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran (Kuswantoro dan Dewi, 2016).

1) Menurut Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu unit kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsector atau sector dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha, yaitu : a) Pertanian; 2) Pertambangan dan Penggalian; 3) industri pengolahan; 4) Listrik, Gas, dan Air Bersih; 5) Bangunan; 6) Perdagangan, Hotel, Restoran; 7) Pengangkutan dan Komunikasi; 8) Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan; 9) Jasa-jasa.

2) Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir. Komponen-komponen tersebut meliputi:

- a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung
- b) Konsumis pemerintah

- c) Pembentukan modal tetap domestic bruto
- d) Perubahan stock
- e) Ekspor *netto*

3) Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum di potong pajak penghasilan dan pajak lainnya. Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu (Kuswantoro dan Dewi, 2016):

a) Produk Domestik Bruto Atas Harga Konstan

Menurut BPS pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi, pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya.

b) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pelaku

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sector perekonomian di suatu wilayah. Yang di maksud nilai tambah yaitu merupakan nilai yang di tambahkan kepada barang dan jasa yang di pakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

b. Hubungan antara PDRB dengan Tingkat Kemiskinan

Pembangunan ekonomi masyarakat pendapatan nasional yang lebih tinggi. Hal itu Akan tercapai apabila tingkat pertumbuhan perekonomian suatu negara juga tinggi (Todaro, 2006). Sejalan dengan itu, (Kuncoro, 2006) menyebutkan bahwa pendekatan pembangunan tardisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang memfokuskan pada usaha peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota.

Mekanisme transmisi pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan telah dikemukakan dengan menggunakan teori pertumbuhan endogen. Secara lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa, ketika suatu rumah tangga memiliki pendapatan sedikit diatas garis kemiskinan dan pertumbuhan pendapatannya sangat lambat yaitu di bawah laju inflasi, maka barang dan jasa yang dapat di belinya menjadi lebih sedikit.

Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Selain itu, syarat kecukupan (*sufficient condition*) adalah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan itu hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (Siregar & Wahyuniarti, 2006).

Laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur melalui berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasilnya. Karena hal tersebut, maka penurunan PDRB suatu daerah akan berdampak pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola konsumsi makanan pokoknya ke barang yang lebih murah dengan jumlah barang yang berkurang (Sukirno, 2000).

3. Pendidikan

a. Definisi Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah hal yang sangat penting dan paling menentukan dalam melakukan pembangunan suatu bangsa. Pentingnya pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki potensi diri yang tinggi.

BPS (2014) membagi jalur pendidikan yang ada di Indonesia menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) **Pendidikan Formal**, yaitu pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan tersebut meliputi SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/Sederajat, SMA/MA/Sederajat dan Perguruan Tinggi.
- 2) **Pendidikan NonFormal**, yaitu jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. **Pendidikan Non-Formal** meliputi kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C) serta pendidikan lainnya yang di tunjukan untuk mengembangkan peserta didik.

b. Hubungan antara Pendidikan dengan Tingkat Kemiskinan

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal

manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia (Permana, Anggit Yoga dan Arianti, 2012).

Investasi pendidikan yang tinggi mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang di perhatikan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Peningkatan pengetahuan dan keahlian mampu mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja seseorang. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas tinggi mampu memperoleh kesejahteraan yang lebih baik (Sitepu, 2010).

Siregar dan Wahyuniarti (2006) menemukan bahwa pendidikan SMP, SMA, dan Diploma memiliki pengaruh signifikan yang terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Hal itu mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia (*human capital*) melalui pendidikan merupakan determinan yang paling penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

4. Upah Minimum

a. Definisi Upah

Definisi gaji pokok/upah adalah sesuatu yang diterima berupa uang ataupun barang sebagai imbalan yang di berikan oleh pemberi kerja kepada karyawan, yang penerimaannya bersifat rutin dan tetap setiap bulan walaupun tidak masuk kerja maka gaji akan diterima secara penuh (Indriyono & Basri, 1995).

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, upah ialah suatu penerimaan atau imbalan dari pemberi kerja untuk suatu yang pekerjaan yang telah di lakukan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi masyarakat yang di nilai dalam bentuk uang dan mendapat persetujuan Undang-Undang dan Peraturan atas dasar perjanjian perusahaan dengan pekerja.

Penerimaan imbalan dari perusahaan kepada pekerja dalam pekerjaan atau jasa yang telah di lakukan dan dinyatakan dalam bentuk yang telah ditetapkan perundang-undang atas dasar suatu perjanjian antar pekerja dengan perusahaan yang termasuk dalam tunjangan baik itu untuk pekerja sendiri maupun keluarganya (BPS, 2015).

Pembagian jenis upah menurut (Kartasapoetra, 2007) dalam bukunya menyebutkan bahwa:

1) Upah nominal

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja yang berhak secara tunai sebagai imbalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industry, perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja. Upah nominal ini sering pula di sebut upah uang (*money wages*), sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya.

2) Upah Nyata

Upah Nyata (*real wages*) upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak bergantung besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima, besar atau kecilnya biaya hidup yang di perlukan.

3) Upah Hidup

Upah hidup adalah upah yang diterima seorang pekerja itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan social keluarganya, misalnya pendidikan, bagi bahan pangan yang memiliki nilai gizi yang lebih baik, iursan asuransi jiwa dan beberapa lainnya lagi.

4) Upah Minimum

Upah minimum pendapatan yang dihasilkan para buruh yang layak dan cukup sesuai perjanjian yang telah di sepakati kedua belah pihak yang berperan dalam hubungan ketenagakerjaan.

5) Upah Wajar

Merupakan upah yang secara relative dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para pekerjanya sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan pekerja kepada pengusaha atau perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka.

b. Faktor-faktor untuk menentukan gaji dan upah

Menurut Moekijat (1992), menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan Gaji dan Upah diantaranya sebagai berikut:

1) Gaji dan Upah yang diberikan oleh pihak swasta

Apabila gaji dan upah yang diberikan pihak swasta naik, maka gaji pegawai negeri cenderung dinaikan juga.

2) Kondisi Keuangan Negara

Apabila keuangan Negara belum memadai, maka kenaikan gaji pegawai negeri akan sulit dilakukan.

3) Biaya Hidup

Biaya Hidup yang meningkat akan mempengaruhi tinggi rendahnya gaji dan upah dinaikan.

4) Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah dapat membatasi besarnya gaji dan upah, misalnya memuat ketentuan gaji atau upah minimum.

5) Kekayaan Negara

Kekayaan Negara mempengaruhi besar kecilnya gaji dan upah. Negara yang kaya dapat memberi gaji yang tinggi kepada pegawai-pegawainya.

6) Produktivitas Pegawai

Pegawai yang produktivitasnya tinggi, perlu diberi gaji atau upah yang tinggi

7) Persediaan Tenaga Kerja

Apabila persediaan tenaga kerja dalam masyarakat sangat kurang, maka ada kecenderungan gaji dan upah dinaikan.

8) Kondisi Kerja

Orang yang bekerja dalam kondisi kerja yang resikonya besar, mendapat gaji atau upah yang lebih baik banyak dari pada orang lain yang bekerja dalam kondisi kerja yang resikonya kecil.

9) Jam Kerja

Jumlah jam kerja mempengaruhi besar kecilnya gaji dan upah yang diberikan. Orang yang bekerja 10 jam akan menerima gaji atau upah yang lebih banyak dari pada orang lain yang bekerja selama 6 jam untuk pekerjaan yang sama.

10) Perbedaan Geografis

Perbedaan Geografis menyebabkan perbedaan dalam kondisi hidup. Kondisi hidup yang berubah mengakibatkan perbedaan dalam besarnya gaji dan upah.

11) Inflasi

Apabila ada inflasi, maka gaji dan upah riil pegawai turun. Dalam keadaan yang demikian gaji dan upah perlu dinaikan.

12) Pendapatan Nasional

Pendapatan Nasional mempengaruhi besarnya gaji dan upah. Apabila pendapatan nasional meningkat, maka gaji dan upah pegawai dapat dinaikann.

13) Harga Pasar

Harga pasar mempengaruhi besar kecilnya gaji dan upah pegawai. Apabila gaji dan upah pegawai tetap, maka hal ini berarti bahwa gaji riil pegawai turun dan perlu di naikan.

14) Nilai Sosial dan Etika

Dari segi social dan etika, pemerintah kurang bebas dalam menentukan kebijakan mengenai gaji para pegawainya. Negara dibebani kewajiban untuk memberikan kesejahteraan umum dan memelihara kondisi masyarakat yang diinginkan.

Upah minimum sendiri dibedakan menjadi dua berdasarkan wilayah yaitu Upah minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Dalam setiap daerah provinsi maupun kabupaten upah yang diberikan dari perusahaan berbeda-beda tergantung dari masing-masing daerah tersebut. Besaran UMP ditentukan oleh gubernur masing-masing Provinsi, karena kebutuhan hidup setiap provinsi berbeda-beda.

c. Komponen Upah Minimum

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-07/Men/1990 tentang pengelompokan upah dan pendapatan Non upah yang terdapat komponen yang tergolong dalam kategori upah atau upah minimum diantaranya sebagai berikut:

1) Gaji Pokok

Gaji pokok adalah imbalan dasar (basic salary) yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

2) Tunjangan Tetap

Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan (pasal 94 UU No. 13/2003). Tunjangan tetap tersebut dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan istri dan/atau tunjangan anak, tunjangan perumahan tunjangan daerah tertentu.

3) Tunjangan Tidak Tetap

Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tidak tetap dan dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport dan/atau tunjangan makan yang didasarkan pada kehadiran.

d. Kebijakan Upah Minimum

Kebijakan upah minimum adalah kebijakan pemerintah dalam menentukan suatu standar minimum yang akan digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri dalam memberikan upah kepada pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya. Sedangkan upah

minimum itu sendiri didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan.

e. Hubungan antara Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan Tingkat Kemiskinan

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan (Kaufman, 2000).

Peran pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah sangat diperlukan dalam menyikapi dampak penetapan upah minimum. Tidak bias hanya pengusaha saja yang harus menanggung dampak penetapan upah minimum ini. Dengan pengertian dan pemahaman serta kerjasama dari semua pihak yang terkait dengan hubungan industrial ini maka dapat di capai tujuan bersama yaitu pekerja/buruh sejahtera, perusahaan berkembang dan lestari pemerintah dapat menjaga perkembangan dan peningkatan perekonomian dengan baik.

5. Kependudukan

a. Definisi Kependudukan

Secara umum penduduk dan warga Negara adalah sekelompok atau sejumlah orang yang menetap di suatu Negara yang saling berinteraksi dan saling terikat pada aturan-aturan yang berlaku di setiap daerah atau Negara dengan syarat harus memiliki surat resmi untuk tinggal di wilayah tersebut. Penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu daerah tertentu. Apabila di daerah didiami oleh banyak orang dan menetap di sana, maka itu bias diartikan sebagai penduduk terlepas dari warga Negara atau pun bukan (Wirosuhardjo, 1986).

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang adanya sangkut paut dengan politik, ekonomi, social, budaya, agama serta lingkungan hidup dengan upaya mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi (Syam dan Wahab, 2015).

Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia semua orang yang berdomisili di wilayah territorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pencatatan dan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang

diterbitkan oleh Negara Lain mendefinisikan penduduk adalah warga Negara Indonesia atau orang asing yang tinggal di suatu wilayah tertentu dalam waktu yang telah ditentukan oleh hukum atau undang-undang berlaku.

b. Teori-teori Kependudukan

Dalam teori kependudukan terdapat para ahli yang di kelompokkan menjadi empat kelompok yaitu:

1) Teori Malthusian (Thomas Robert Malthus)

Orang yang pertama mengemukakan teori mengenai penduduk ialah Thomas Robert Malthus yang merupakan seorang pendeta di Inggris yang hidup pada tahun 1776 hingga wafat tahun 1824. Pada bukunya beliau mengemukakan bahwa hubungan kelamin yang terjadi antara seseorang laki-laki dan perempuan yang secara terus menerus dengan rasa nafsu yang tidak bisa dihentikan yang dapat mengakibatkan pertumbuhan penduduk meningkat dengan pesat. Malthus juga berpendapat bahwa manusia hidup memerlukan bahan makanan dan minuman, namun laju pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan laju pertumbuhan makanan yang lambat. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan pertumbuhan penduduk untuk mencegah terjadinya kekurangan bahan makanan.

2) Teori Neo-Malthusian

Teori Neo-Malthusian pada akhir ke-19 dan permulaan abad ke-20 teori Malthus mulai di perdebatkan lagi. Kelompok Neo-Malthusian adalah kelompok yang mendukung aliran Malthusian tetapi bersifat lebih radikal. Kelompok ini menganjurkan agar dapat keluar dari perangkap Malthus, pengurangan penduduk dilakukan dengan cara *preventive check* yaitu dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk dapat mengurangi jumlah kelahiran. Aliran ini berusaha menyadarkan manusia dengan fakta-fakta yang ada bahwa jumlah penduduk dunia terus menerus bertambah sedangkan bahan makanan mengalami kelangkaan, wilayah dunia semakin sempit karena kepadatan manusia sehingga tempat tinggal manusia menjadi rusak dan tercemar. Dalam buku yang berjudul “The Limits to Growth”, Meadows menjelaskan antara hubungan pertumbuhan penduduk dengan beberapa variabel lain seperti produksi pertanian, penggunaan sumber daya alam, produksi industry seperti polusi. Kelima variabel tersebut digambarkan dalam tiga tahapan yaitu kenaikan, stabil, dan penurunan, dan pada setiap variabel tidak terjadi bersamaan di setiap tahapan. Pada saat jumlah penduduk mengalami kenaikan maka sumber daya alam telah mengalami penurunan, produksi pertanian dan industry mengalami kenaikan. Akan tetapi jumlahnya tidak dapat mengimbangi kenaikan jumlah penduduk, sementara itu secara

konsisten tingkat polusi terus meningkat akibat dari naiknya jumlah penduduk dan industri.

3) Teori Marxist

Teori ini adalah teori yang tidak sependapat dengan teori Malthus. Yang merupakan teori generasi sesudah Malthus. Teori Marxist dikemukakan oleh Karl Marx dan Fried Engels. Paham Marxist pada umumnya tidak sependapat dengan Malthus yang bila tidak dibatasi penduduk akan kekurangan makanan karena menurut Karl Marx dan Fried Engels bertentangan dengan nurani manusia menurut mereka penambahan penduduk yang cepat tidak berakibat kepada tekanan bahan pangan yang mengakibatkan kelaparan namun, tekanan penduduk akan mengakibatkan tekanan terhadap kesempatan kerja. Kemiskinan yang dialami penduduk disebabkan oleh kesalahan struktur pada masyarakat, di mana kaum kapitalis (pemilik modal) mengambil sebagian pendapatan para buruh dengan cara membayar buruh dengan upah yang murah. Oleh karena itu menurut Karl Marx dan Fredrich Engels yang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan atau kemelaratan bukanlah mengurangi jumlah penduduk, akan tetapi melakukan perubahan social.

4) Teori John Stuart Mill

John Stuart Mill merupakan seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi berkebangsaan inggris dapat menerima pendapat Malthus

mengenai laju pertumbuhan penduduk laju pertumbuhan bahan makanan sebagai suatu aksioma. Namun demikian dia berpendapat bahwa pada situasi tertentu manusia dapat memengaruhi perilaku demografinya. Selanjutnya beliau mengatakan apabila produktivitas seorang tinggi beliau cenderung ingin memiliki keluarga kecil. Dalam situasi seperti ini fertilitas akan rendah. Jadi taraf hidup (standard of living) merupakan determinan fertilitas. Tingkat kelahiran manusia dapat ditentukan oleh manusia itu sendiri, oleh karena itu Mill menyarankan untuk meningkatkan pendidikan penduduk sehingga secara rasional mereka akan dapat mempertimbangkan apakah perlu menambah jumlah anak atau tidak dan menyesuaikan dengan karir dan pekerjaan mereka. Mill berpendapat bahwa perempuan pada umumnya tidak menginginkan anak yang banyak, sehingga hal tersebut tentu akan membuat tingkat kelahiran menjadi rendah.

c. Hubungan antara Jumlah Penduduk dengan Tingkat Kemiskinan

Kenaikan jumlah penduduk dari waktu ke waktu mengakibatkan kenaikan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah, dan sempitnya kesempatan kerja merupakan akar permasalahan kemiskinan. Jadi aspek demografis mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan yang dihadapi di Indonesia pada saat ini. Daerah miskin sering ditinggalkan penduduknya untuk bermigrasi ke tempat lain dengan alasan mencari

kerja. Hal ini akan berdampak pada berbagai macam masalah ekonomi seperti meningkatnya kemiskinan yang terus bertambah. Tingginya angka kemiskinan dan berbagai macam masalah ekonomi lainnya di setiap wilayah atau Negara. Dengan kata lain jumlah penduduk yang besar sebagai penyebab timbulnya kemiskinan, tinggi rendahnya jumlah penduduk dipengaruhi oleh proses demografis yakni: kelahiran, kematian, dan migrasi. Tingkat kelahiran yang tinggi sudah barang tentu akan meningkatkan tingkat pertumbuhan penduduk. Tapi jika tingkat kelahiran yang tinggi di Indonesia kebanyakan berasal dari penduduk golongan miskin. Oleh karena itu, perlu adanya suatu upaya untuk dapat menekan laju pertumbuhan penduduk, serta upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang merupakan bagian dari penduduk suatu Negara, yang harus diikutsertakan dalam proses pembangunan karena banyaknya angkatan kerja dan pengangguran adalah bagian dari penduduk yang dapat menggerakkan proses ekonomi.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai analisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya diberbagai negara.

Pada penelitian tentang kemiskinan kronis di India yang dilakukan oleh Mehta dan Shah, (2012) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah gabungan dari beberapa beberapa faktor, tidak hanya pendapatan, namun juga terkait dengan

bangunan, total kredit, nutrisi dan kesehatan, tingkat literasi, dan pendidikan, sanitasi, dan fasilitas infrastruktur. Penelitian ini bercerita tentang indikator multidimensional yang menyebabkan kemiskinan terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, estimasi kematian bayi, dan literasi kaum perempuan.

Dalam penelitian Al- Mamun, Abdul Wahab, dan Malarvizhi, (2011) meneliti tentang pengaruh kredit mikro terhadap kemiskinan di Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode cross sectional design dengan stratified random sampling. Hipotesis dari penelitian ini adalah pemberian kredit mikro akan meningkatkan pendapatan rumah tangga partisipan. Partisipasi mikrokredit dihitung dari lamanya pemberian kredit mikro (bulan), pendapatan rumah tangga digunakan sebagai indikator umum dalam kesejahteraan keluarga, status kemiskinan, dan keamanan ekonomi. Hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa ketika kredit mikro meningkat maka angka kemiskinan di Malaysia akan menurun.

Didu dan Fauzi (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tahun 2003-2012 dengan metode *OLS*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi maka tingkat kemiskinan akan semakin rendah. Dalam konteks pendidikan, adanya wajib belajar, beasiswa bagi putra-putri terbaik, serta program khusus pemerintah untuk memajukan pendidikan dapat dimaksimalkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Selain itu adanya kredit tanpa agunan dan modal bantuan untuk berwiraswasta merupakan hal yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu jika pemerintah daerah Kabupaten Lebak dapat meningkatkan kualitas seseorang (pendidikannya) serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan program yang efisien, hal tersebut dapat menekan angka kemiskinan. Karena keberhasilan suatu negara dapat diukur dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Namun menurut Nurfauziah (2017), variabel PDRB memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah selama 6 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB belum tentu mengurangi tingkat kemiskinan pada daerah tersebut. Peningkatan PDRB yang banyak teralokasi untuk sektor infrastruktur menyebabkan kemiskinan tidak dapat diminimalisir. Oleh karena itu, APBD yang didapatkan dari PDRB diharapkan dapat memfokuskan kegiatan yang dapat mengurangi kemiskinan, seperti bantuan non tunai dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Dalam provinsi yang sama, Jawa Tengah, Wahyudi (2018) juga melakukan analisis tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, inflasi, dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan selama 15 tahun. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semua variabel independen kecuali inflasi dan PDRB memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kenaikan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas pendidikan dapat mengurangi jumlah kemiskinan. Kebijakan

pemerintah seperti membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas juga dapat menjadi faktor pendukung pengentasan kemiskinan.

Selain itu Handayani (2017), dengan model *Fixed Effect* juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah 2011-2015). Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan sedangkan jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Mengenai faktor pendidikan, tidak terdapatnya pengaruh variabel ini terhadap kemiskinan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), menentukan kebijakan untuk perencanaan pembangunan daerah perlu diperhatikan dengan seksama agar peningkatan pendapatan PDRB dapat termonitor dengan baik. Selain itu jumlah penduduk yang lebih besar sebenarnya memiliki potensi yang besar juga dalam meningkatkan ekonomi. Sebab dengan adanya jumlah penduduk yang lebih banyak dapat menggerakkan kegiatan ekonomi dalam bidang barang dan jasa. Dalam produksi, semua pihak dapat diuntungkan, penawaran tenaga kerja yang tinggi dan biaya produksi yang murah merupakan beberapa contoh dari keuntungan tersebut. Pada akhirnya, kesejahteraan rakyat pun meningkat dan tingkat kemiskinan di daerah tersebut berkurang tiap tahunnya.

Dalam penelitian Ayu (2018), Produk Domestik Regional Bruto, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, jumlah penduduk, dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) merupakan faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur periode

2010-2015. Dengan *Fixed Effect Model*, hasil penelitian menyimpulkan bahwa meningkatnya PDRB, IPM, dan jumlah penduduk, maka tingkat kemiskinan di daerah tersebut juga ikut menurun. Di provinsi Jawa Timur, sektor yang lebih dominan dan dapat dikembangkan adalah sektor pertanian, industri, dan perdagangan. Ketiga sektor tersebut merupakan pendapatan terbesar bagi perekonomian (PDRB) di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, pemerintah perlu memaksimalkan ketiga sektor tersebut dengan langkah-langkah yang tepat agar dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di provinsi Jawa Timur.

Kemudian peningkatan jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Timur diharapkan dapat menjadi pengontrol laju pertumbuhan ekonomi di desa, dikarenakan angka kelahiran di desa lebih besar dibanding di kota. Program Keluarga Berencana merupakan solusi terbaik untuk dilakukan di desa sehingga jumlah penduduk lebih banyak didominasi oleh usia-usia produktif. Penduduk usia produktif akan menambah jumlah tenaga kerja dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Karena pada usia produktif kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masih terbuka lebar. Oleh karena itu, meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Sementara itu variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan pengangguran memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Kenaikan UMK dan pengangguran menyebabkan kemiskinan ikut meningkat. Hal tersebut dikarenakan kenaikan UMK yang

terjadi, diiringi dengan pemotongan proporsi jumlah tenaga kerja untuk mengurangi pengeluaran perusahaan. Sehingga jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan tidak sebanyak jumlah penawaran tenaga kerja.

Shafira (2017) melakukan penelitian tentang faktor pengaruh PDRB, tingkat pendidikan, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Yogyakarta periode 2008-2014. Berdasarkan hasil penelitian dengan *Fixed Effect Model*, diketahui bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Semakin besar PDRB maka tingkat kemiskinan akan menurun. Variabel pendidikan, dilihat dari rata-rata lama sekolah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Seiring meningkatnya kualitas pendidikan maka jumlah penduduk miskin akan berkurang. Tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PDRB adalah melakukan kerja sama dengan Kabupaten/Kota di sektor-sektor yang potensial. Karena dengan kerja sama tersebut dapat membantu perkembangan perekonomian di Kabupaten/Kota yang kurang berkembang sehingga PDRB dapat meningkat. Untuk pendidikan, pemerintah perlu menggalakan pendidikan di bidang tertentu misalnya, sekolah kejuruan, kursus, dan pelatihan. Sehingga masyarakat memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang dan dengan keahlian yang dimiliki tersebut, masyarakat dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan beasiswa pada siswa yang

kurang mampu. Sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama golongan miskin.

Penelitian tentang pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran di Provinsi DIY yang dilakukan oleh Rahmawati, (2017) menjelaskan bahwa semua variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Variabel jumlah penduduk dapat mengurangi kemiskinan dikarenakan penduduk di DIY lebih didominasi oleh penduduk di usia produktif sehingga kesempatan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan hidup menjadi lebih tinggi. Selain itu, masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi di DIY juga dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, dengan memberikan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Semakin besar PDRB dan semakin tinggi kualitas pendidikan suatu daerah dapat menekan tingkat kemiskinan. Dalam hal ini pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan dapat bekerja sama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menentukan kebijakan yang dapat mengurangi kemiskinan. Untuk konteks pendidikan, pemerintah diharapkan dapat mengadakan program bantuan untuk masyarakat yang putus sekolah supaya dapat menekan kemiskinan di daerah tersebut.

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara terhadap rumusan masalah yang akan diuji oleh data. Karena hipotesis sangat penting dan tidak bisa di

tinggalkan. Karena merupakan kerja dari teori yang menjadi jawaban terhadap persoalan penelitian sebelumnya mengumpulkan data maka dari itu suatu penelitian disusun dalam bentuk pertanyaan. Dari uraian latar belakang, rumusan masalah, dan penelitian terdahulu dan juga teori yang telah dijelaskan dapat dilihat pengaruh hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependen yang dirumuskan dalam beberapa hipotesis sebagai berikut:

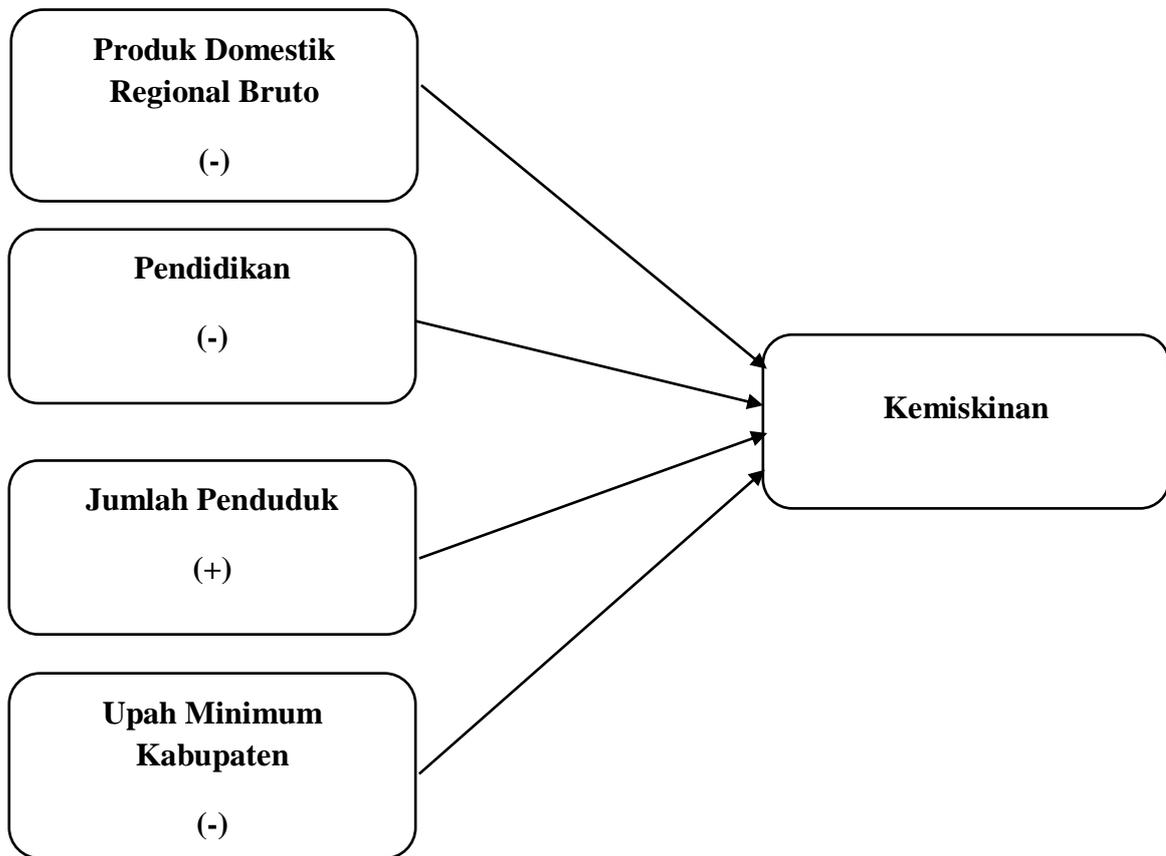
1. Diduga Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2011 - 2017.
2. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2011 - 2017.
3. Diduga Upah Minimum Kabupaten berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2011 - 2017.
4. Diduga Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2011 - 2017.

Tabel 2. 1
Penjelasan tiap Variabel dan Hipotesis

No	Variabel	Keterangan	Penelitian terdahulu	Sign
1	Kemiskinan	Persentase tingkat kemiskinan (%)	(Winarendra, 2014), (Syam dan Wahab, 2015), (Putra dan Arka, 2016)	
2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Atas dasar harga konstan 2000 (Milyar Rupiah)	(Wibisono, 2015), (Kuswanto dan Dewi 2016), (Shafira, 2017),	-
3	Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (%)	(Nugroho, 2015), (Rahmawati, 2017), (Nurfauziah, 2018)	-
4	Jumlah Penduduk (JP)	Pertumbuhan Penduduk (Ribu Jiwa)	(Didu dan Fauzi, 2016), (Rahmawati, 2017), (Wahyudi, 2018)	+
5	Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Upah Minimum Kabupaten/Kota Ditetapkan (Juta Rupiah)	(Kuswanto dan Dewi, 2016), (Ayu, 2018) (Sutikno, Rotinsulu dan Tumangkeng, 2019)	+

D. Kerangka Pemikiran Teoritis

Untuk memperjelas dan mempermudah pemikiran dalam penelitian yang dilakukan mengenai penjelasan hubungan antar variabel indepen terhadap variabel dependen. Penelitian ini di lakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas atau variabel independen terhadap Tingkat Kemiskinan. Maka di susun kerangka penelitian ini yang akan dilakukan seperti ini:



Gambar 2. 2
Kerangka Berfikir Penelitian